

RENCANA KERJA – PERUBAHAN
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat karunia-Nya dokumen Rancangan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025 telah dapat tersusun.

Penyusunan RENJA Perubahan Tahun 2025 berisikan informasi mengenai evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RENJA 2025 dan DPA 2025 serta usulan program dan kegiatan yang disertai dengan pagu indikatif dan indikator sasaran kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2025. Renja merupakan salah satu instrumen untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah dan untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja sebagai wujud dari kinerja perangkat daerah yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2025 merupakan salah satu dokumen perencanaan yang menggambarkan inventarisasi dari keseluruhan Program dan Kegiatan 7 (tujuh) Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Timur selama satu tahun anggaran. Dalam pelaksanaannya Rencana Kerja ini akan disesuaikan kembali berdasarkan pagu indikatif anggaran yang ditetapkan bagi masing-masing Bagian sehingga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2025.

Akhir kata, semoga Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2025 ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Bagian - Bagian di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2025.

Borong, September 2025

Sekertaris Daerah
Kabupaten Manggarai Timur,

Ir. Boni Hasudungan
Pembina Utama Madya
NIP. 19660601 199303 1 012

BUPATI MANGGARAI TIMUR

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI MANGGARAI TIMUR

NOMOR 71 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjalg Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 103);
7 Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Nomor 198);
8 Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 68 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur 2025 (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025 Nomor 68).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

2. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Renja PD adalah dokumen perubahan Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode I (satu) tahun.
3. Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKA PD adalah dokumen perubahan perencanaan dan penganggaran yang berisi perubahan rencana pendapatan, perubahan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta perubahzrn rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Perubahan APBD.
4. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan APBD adalah perubahan rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Unsur Pembantu Bupati Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Timur dalam penyelengaran urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
6. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Timur.
7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur.
8. Bupati adalah Bupati Manggarai Timur.

BAB II
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2025.
(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025.

11. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu ; dan
12. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

c. Urusan Pilihan
   1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ;
   2. Dinas Pertanian ; dan
   3. Dinas Peternakan.

d. Urusan Pendukung
   1. Sekretariat Daerah terdiri dari :
      a) Bagian Umum ;
      b) Bagian Ekonomi dan Administrasi Pembangunan ;
      c) Bagian Hukum ;
      d) Bagian Humas dan Komunikasi Pimpinan ;
      e) Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat ;
      f) Bagian Organisasi ; dan
      g) Bagian Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.
   2. Sekretariat Dewan

e. Urusan Penunjang
   1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah ;
   2. Badan Keuangan Daerah ; dan
   3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

f. Urusan Pengawasan, yaitu Inspektorat Daerah.

g. Urusan Kewilayaan
   1. Kecamatan Borong ;
   2. Kecamatan Elar Selatan ;
   3. Kecamatan Sambi Rampas ;
   4. Kecamatan Congkar ;
   5. Kecamatan Rana Mese ;
   6. Kecamatan Lamba Leda Selatan ;
   7. Kecamatan Kota Komba ;
   8. Kecamatan Elar ;
   9. Kecamatan Kota Komba Utara ;

10. Kecamatan Lamba Leda Timur ;
11. Kecamatan Lamba Leda.; dan
12. Kecamatan Lamba Leda Utara.

(2) Rincian Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1tercantum dalam Lampiran yang merupalan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB III

PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manggarai Timur.

Ditetapkan di Borong
pada tanggal 2025
BUPATI MANGGARAI TIMUR,

YAGAS ANDREAS

Diundangkan di Borong
pada tanggal 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,

BONI HASUDUNGAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2025 NOMOR

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
BAB I
PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 1
1.3 Maksud dan Tujuan 4
1.4 Sistematika Penulisan 5
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TRIWULAN II 6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra 6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan 15
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 15
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 15
BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR 27
3.1 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Timur (Formulir E.70) 27
3.2 Rincian Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2025 (Form 2) 28
BAB IV
PENUTUP 38

DAFTAR TABEL

Tabel TC.29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	……..	I-1
Tabel TC.31	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD		
Tabel TC.30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Timur (Tabel TC.30 menggunakan tabel pelaporan data perencanaan pembangunan Triwulan II Tahun 2025 yaitu Formulir E.70	……..	II-2
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah	……..	III-1
Tabel TC.33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Perubahan Tahun 2025	……..	IV-1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah. Dokumen Renja yang disusun setiap tahunnya memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah atau biasa disebut dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan berpedoman pada Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) serta memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan.

Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Perubahan RKPD) dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Timur yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-undang Nomor 36 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor: 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Nomor: 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001 seri ENomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilyah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010 - 2030 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0045);
14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0016 Tahun 2021);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 78);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 103);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukanan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten

Manggarai Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peratuaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 157);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peratuaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 171);

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Timur disusun untuk menyesuaikan dengan perubahan perkembangan keadaan dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Timur dan hasil pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Timur sampai dengan triwulan II Tahun 2025.

b. Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Timur disusun agar tujuan dan sasaran Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Timur tahun 2025 dapat dicapai.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Sekretriat Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025 meliputi :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Tahun Lalu dan Capaian Renstra
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3 Isu-Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III. PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

3.1 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Timur (Formulir E.70)
3.2 Rincian Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2025

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Timur serta evaluasi pencapaian indikator kinerja Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025-2029 yang disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini merupakan data dan informasi tentang akumulasi realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam Rancana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Timur sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dibandingkan dengan pencapaian yang diharapkan dari penetapan target kinerja dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025-2029. Berdasarkan hasil evaluasi ini dapat diketahui program dan kegiatan mana yang tidak memenuhi atau memenuhi dan/atau melebihi persentase pencapaian target kinerja hasil (*outcome)* dan keluaran *(output)* yang telah direncanakan.

Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Timur melaksanakan unsur pendukung urusan pemerintahan. Pelaksanaan atas bidang urusan selama periode tersebut dijabarkan dalam pelaksanaan berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan Sekretariat Daerah sebagai perangkat daerah dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten Manggarai Timur.

Hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan ukuran terhadap pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) sampai dengan triwulan II Tahun 2025 dan pencapaian kinerja Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025-2029 dituangkan dalam bentuk tabel sebagaimana disajikan pada Formulir E.81
berikut :

Formulir E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Manggarai Timur Triwulan II

Renja Perangkat Daerah SEKRETARIAT DAERAH Kabupaten Manggarai Timur

Periode Pelaksanaan 2025

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran RKPD:

-	Nilaii Komponen Pelaporan Dalam SAKIP																
-	Rata-rata pencapaian program Sekretariat Daerah																
-																	

No	Tujuan	SASARAN	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (Komposit Output) dan SubKegiatan (Output)	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		9		10 = 9 / 8		11 = 9 / 6 x 100 %		
1	2	3	4	5	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	

	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Keuangan Dan Efektivitas Pemerintahan			Nilai SAKIP Pemerintah Daerah													**RPJMD**
A		Meningkatnya kualitas Kinerja penyelenggaraan pemerintahan		Nilaii Komponen Pelaporan Dalam SAKIP													**Sekda/Asisten**
				Rata-rata pencapaian program Sekretariat Daerah													**Sekda/Asisten**
																	Sekda/Asisten
1			**Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase ketercapaian Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**100**		100		**100**								**Kabag Umum**
1,1			**KEGIATAN ….....**														**KEPALA SUB BAGIAN…**
1.1.1			**SUBKEGIATAN…...**														
1.1.2			**SUBKEGIATAN…...**														
			**DST…..... **														
2			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tingkat Pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah, Wakil Kepala**	**12**		**100**		**12**	1.020.113.000	6	510.056.500	50%	510.056.500	50%	510.056.500	**Kabag Umum**

				Daerah Sekertaris daerah													
				Cakupan pelayanan protokol dan komunikasi pimpinan daerah	**100**		**100**		**100**	118.770.000	52	59.385.000	52%	59.385.000	52%	59.385.000	**Kabag Prokopm**
				Tingkat kematangan penataan perangkat daerah.	**45,0**		**39,25**		**41,2**	112.867.900	21	56.433.950	51%	56.433.950	47%	56.433.950	**Kabag Organ**
				Persentase PD dengan nilai SAKIP kategori B	**100**		**35**		**43**	41.181.400	22	20.500.700	51%	20.500.700	22%	20.500.700	**Kabag Organ**
				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pemerintahan	**85**		**79,84**		**40**	45.571.600	20	22.785.800	50%	22.785.800	24%	22.785.800	**Kabag Organ**
2,1			**KEGIATAN ….....**														**KEPALA SUB BIDANG**
2.1.1			**SUBKEGIATAN…...**														
2.1.2			**SUBKEGIATAN…...**														
3			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase Ketersediaan data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)**	**92,42**		82		**92,98**	3.913.106.000	48	1.956.553.000	52%	1.956.553.000	52%	1.956.553.000	**Kabag Tapem Kesra**
				Persentase Rancangan Produk Hukum yang diharmonisasi	**100**		100		**100**	371.109.300	40	185.554.650	40%	185.554.650	40%	185.554.650	**Kabag Hukum**

				Persentase Fasilitasi Bantuan Hukum	**100**		100		**100**	5.659.300	-	-	0%	-	0%	-	**Kabag Hukum**
				Persentase kesepakatan Kerjasama yang ditindaklanjuti	**95**		100		**100**	596.322.000	42	382.400.000	42%	382.400.000	44%	382.400.000	**Kabag Tapem Kesra**
				Persentase peningkatan pelayanan kesejahteraan rakyat	**100**		96		**100**	2.329.075.500	46	1.164.537.750	4600%	1.164.537.750	46%	1.164.537.750	**Kabag Tapem & Kesra**
3,1			**KEGIATAN ….....**											-			**KEPALA SUB BIDANG**
3.1.1			**SUBKEGIATAN…...**														
3.1.2			**SUBKEGIATAN…...**														
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN														
4			**KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN**	**Persentase kajian Kebijakan Perekonomian Daerah yang ditindak lanjuti**	**100**		100		**100**	112.822.000	50	56.411.000	50%	56.411.000	0%	56.411.000	**Kabag EKBANG**
			KEGIATAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGNAN	**Persentase kebijakan pembangunan daerah yang ditindaklanjuti (Persentase)**	**100**		100		**100**	40.841.500	50	20.420.750	50%	20.420.750	50%	20.420.750	**Kabag EKBANG**
			KEGIATAN PPENGELOLAAN PENGADAAN BARANG/JASA	**Tingkat Kematangan UKPBJ (Persentase)**	**100**		100		**100**	402.781.400	50	201.390.700	50%	201.390.700	50%	201.390.700	**Kabag PBJ**
Rata-rata capaian kinerja SASARAN (%); (A+B+C+ …. + G)/7 x 100%																	
Rata-rata capaian kinerja PROGRAM (%); PROGRAM 1 + PROGRAM 2 + …. PROGRAM n / TOTAL PROGRAM x 100 %																	
Rata-rata capaian kinerja KEGIATAN (%); (KEGIATAN 1 + KEGIATAN 2 + …. + KEGIATAN n / TOTAL KEGIATAN x 100%																	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (Oleh Kepala Perangkat Daerah)
Faktor penghambat pencapaian kinerja: (Oleh Kepala Perangkat Daerah)
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya (Oleh Kepala Bappelitbangda) :
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya (Oleh Kepala Bappelitbangda) :

Paraf Koordinasi :

01.	**Asisten 1 ….**	
02.	**Asisten 2 ….**	
03.	**Asisten 3 …**	
04.	**Kabag ….**	
	Dst…	

DISUSUN

BORONG, OKTOBER 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

Ir. Boni Hasudungan
NIP.19660601 199303 1 012

Paraf Koordinasi :

01.	**Sekretaris Bappelitbangda Kabupaten Manggarai Timur**	
02.	**Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Pembangunan Daerah**	
03.	**Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	
04.	**Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I**	
05	**Kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi & Pelaporan**	

DIEVALUASI

BORONG, JUNI 2025

KEPALA BAPPERIDA
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

Drs. Remigius Gonsa Tombor
NIP. 19681001 199403 1 009

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Timur merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang urusan administrasi pemerintah. Dalam Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Timur memuat tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Pimpinan Daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat daerah serta pelayanan administratif.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris Daerah mempunyai fungsi :
    a. Pengkoordinasian penyusunan kabijakan Pemerintah Kota;
    b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
    c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota;
    d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara Pemerintah Kota;
    e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, indikator pelayanan yang tercakup dalam kinerja pelayanan Sekretariat Daerah dalam urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang administrasi pemerintahan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah terhadap beberapa kendala, antara lain :

1. Belum optimalnya penyampaian data yang dibutuhkan dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan;
2. Peningkatan kualitas koordinasi dan komitmen pimpinan serta jajarannya dalam penyelenggaraan tata kelola dan pelayanan administrasi pemerintahan;
3. Kurangnya sinkronisasi pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan baik yang disebabkan karena perubahan aturan dikementerian/lembaga dan juga keterlambatan perangkat daerah untuk mengakomodir aturan yang berlaku.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah fungsi penunjang bidang urusan administrasi pemerintahan, program, kegiatan dan sub kegiatan tahun rencana 2025 berdasarkan RKPD Tahun 2024 serta hasil analisis kebutuhan disajikan dalam tabel berikut :

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025

KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**	**Catatan Penting**
	2		**3**		**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**		**Persentase Ketersediaan data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)**	**92,98%**	**2.394.211.500**	
								Persentase Peningkatan Kerjasama antar pemerintah dan non pemerintah	**100%**		
								Persentase peningkatan pelayanan kesejahteraan rakyat	**100%**		
								Persentase Rancangan Produk Hukum yang diharmonisasi	**100%**		
	Administrasi Tata Pemerintahan					**Administrasi Tata Pemerintahan**		**Persentase Peningkatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Penataan Urusan Daerah**	**100%**	974.497.000	
	Penataan Administrasi Pemerintahan					Penataan Administrasi Pemerintahan		Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2 Dokumen	24.400.000	

	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan					Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2 Dokumen	43.476.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah					Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	5 Dokumen	906.621.000	
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat					**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**		**Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**100%**	546.581.500	
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual					Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 Dokumen	20.181.500	
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial					Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial		Jumlah Dokumen hasil kebijakan, evaluasi dan capaian kinerjaa Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 Dokumen	519.400.000	
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat					Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja TerkaitKesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	12 Dokumen	7.000.000	
	Fasilitasi Kerjasama Daerah					**Fasilitasi Kerjasama Daerah**		**Persentase peningkatan kerjasama antar pemerintah dan non pemerintah**	**100%**	601.022.000	
	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri					Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	10 Dokumen	601.022.000	

	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum					**Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**		**Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum (Rancangan Peraturan yang diselesaikan)**		272.111.000	
	Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah					Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	119 Dokumen	184.550.500	
	Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum daerah					Sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum		Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	**2 Kasus**	73.513.500	
	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum Dan Pengelolaan Informasi Hukum					Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum Dan Pengelolaan Informasi Hukum		Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	210 Dokumen	14.047.000	
	Program Administrasi Umum / Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					**Program Administrasi Umum / Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		Cakupan pelayanan protokol dan komunikasi pimpinan daerah	100%	**751.575.500**	
								Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pemerintahan	80 Nilai		
								Rata-rata Nilai SAKIP Perangkat Daerah	62.95 Nilai		
								Tingkat kematangan penataan perangkat daerah.	41.20 Nilai		
								Tingkat Pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah, WakilKepala Daerah Sekertaris daerah	100%		

	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan					**Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**		**Presentase Pelaksanaan Keprotokoleran dan Komunikasi Pimpinan**	**100%**	**232.356.000**	
	Fasilitasi Keprotokolan					Fasilitasi Keprotokolan		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	75.694.000	
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan					Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	88.208.000	
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan					Pendokumentasian Tugas Pimpinan		Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	68.454.000	
	Kegiatan: Penataan Organisasi					**Kegiatan: Penataan Organisasi**		**persentase Penataan Organisasi**	100%		
	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan					Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	40 Dokumen	276.926.500	
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana					Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	40 Laporan	69.716.500	
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi					Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	74.768.000	
	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana					Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksan	40 Dokumen	51.644.500	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	43 Dokumen	46.164.000	
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**		**Persentase kajian Kebijakan Perekonomian Daerah yang ditindak lanjuti** **Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan dengan Metode Tender**		**648.902.900**	
	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian					***Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian***		**Cakupan Implementasi Kebijakan Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam dan BUMD/BLUD**	**100%**	**96.469.000**	
02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian					Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	16 Laporan	96.469.000	
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan					***Pelaksanaan Administrasi Pembangunan***		**Prosentase Ketercapaian Program Pembangunan**	**100%**	**13.316.500**	
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan					Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	16 Laporan	13.316.500	
	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa					**Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**		**Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan dengan Metode Tender**	100%	477.572.400	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa					Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100 Dokumen	353.018.300	

	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik					Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik		Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	50 Dokumen	72.806.300	
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa					Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	50 Orang	51.747.800	
	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam					**Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**		**Prosentase bahan pemantauan dan evaluasi kebijakan Sumber Daya Alam yang direkomendasikan**	100%	61.545.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Rekomendasi	61.545.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Cakupan pelayanan protokol dan komunikasi pimpinan daerah	**100%**	**129.837.040**	
								Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pemerintahan	80 Nilai	150.000.000	
								Rata-rata Nilai SAKIP Perangkat Daerah	62.95 Nilai	150.000.000	
								Tingkat kematangan penataan perangkat daerah	41.20 Nilai	150.000.000	

								Tingkat Pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah Sekertaris daerah	100%	1.027.125.732	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**7.175.986**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat D					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat D		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	4.429.873	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	1.027.475	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	1.718.637	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**6.641.760.161**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/Bulan	5.655.638.785	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	976.604.760	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD danLaporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	4 Laporan	9.516.616	

								Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKP			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Terlaksananya pelayanan administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**917.154.968**	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	56.026.902	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	26.605.300	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	218.035.567	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu					Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	141.954.624	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	474.532.575	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**6.500.000**	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	12 Paket	6.500.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Terlaksananya Administrasi Barang Perangkat Daerah**	**100%**	**3.825.000**	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	3.825.000	

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**148.324.616**	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	148.324.616	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**501.686.387**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	14.026.209	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	246.252.381	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	8.139.600	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	233.268.197	
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah					**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**		**Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah**	**100%**	**1.110.634.019**	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah					Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 Paket	622.258.019	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah					Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	488.376.000	

	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**		**Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**100%**	**536.181.918**	
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	244.188.000	
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 Orang	101.745.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	190.248.918	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**1.151.359.647**	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	131.101.485	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80Unit	51.096.339	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit	857.160.927	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	112.000.896	

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

3.1 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Timur (Formulir E.70)

Akuntabilitas Kinerja mempunyai makna sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra (Rencana Strategis) Instansi.

Data pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Timur dapat dilihat pada Formulir E.70 berikut :

DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DATA TUNGGAL PROGRAM

Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah
Kabupaten Manggarai Timur

No Program	Program	No Indikator	Uraian	Satuan	Tahun			Pencapaian Triwulan 2 (April - Juni) Thn 2025	KET
					2022	2023	2024		
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Tingkat Pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah Sekertaris daerah**	%				**50%**	
			Jumlah Pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	%				50	
			Jumlah Pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	%				100	
			Cakupan pelayanan protokol dan komunikasi pimpinan daerah					**52%**	
			Jumlah Fasilitasi Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang diberikan	%				52	
			Jumlah Fasilitasi Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang seharusnya tersedia (35 berdasarkan UU 10 2009)	%				100	
			tingkat kematangan penataan perangkatdaerah.	**Nilai**	**39,25**	**39,25**	**39,25**	**51%**	
			Total Nilai Perangkat Daerah		**314**	**314**	**314**	21	
			Jumlah Perangkat Daerah		**8**	**8**	**8**	41,2	
			Persentase PD dengan nilai SAKIP kategori B	**Nilai**	**67,44**	**67,44**	**67,44**	**51%**	
			Jumlah PD dengan nilai SAKIP B		**29**	**29**	**29**	22	
			Jumlah OPD		**43**	**43**	**43**	43	
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pemerintahan	**Nilai**	**90,41**	**81,47**	**83,34**	50%	
			Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelauanan Publik		**79,84**	**81,47**	**83,34**	40	
2	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**		**Persentase Ketersediaan data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)**					**52%**	
			Jumlah data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) yang disediakan					48	
			jumlah data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) yang harus disediakan					92,98	
			Persentase Rancangan Produk Hukum yang diharmonisasi					**40%**	
			Jumlah rancangan Produk hukum yang di fasilitasi	Produk Hukum				40	
			jumlah rancangan produk hukum yang diusulkan	Produk Hukum				100	
			Persentase Fasilitasi Bantuan Hukum					**0**	
			Jumlah Kasus yang difasilitasi	Kasus				0	
			Jumlah yang dilaporkan	Kasus				0	
			Persentase kesepakatan Kerjasama yang ditindaklanjuti					**42%**	
			Jumlah kesepakatan Kerjasama yang ditindaklanjuti	**PD**				42	
			Jumlah kesepakatan Kerjasama	**PD**				100	
			Persentase peningkatan pelayanan kesejahteraan rakyat					**46%**	
			Jumlah kegiatan pelayanan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	**PD**				46	
			Jumlah kegiatan pelayanan kesejahteraan rakyat	**PD**				100	

3	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**		**Persentase kajian Kebijakan Perekonomian Daerah yang ditindak lanjuti**					**50%**	
			Jumlah Kebijakan Perekonomian dan SDA yang ditindaklanjuti	**Lap**				50	
			jumlah Kebijakan Perekonomian dan SDA yang dihasilkan	**Lap**				100	
			Tingkat Kematangan UKPBJ (Persentase)					**50%**	
			Nilai realisasi pengadaan dengan metode tender					50	
			nilai rencana pengadaan dengan metode tender					100	

Paraf Koordinasi :

01.	Asisten 1	
02.	Asisten 2	
03.	Asisten 3	
04.	Kabag	
05	Dst	

PRODUSEN DATA
BORONG, OKTOBER 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

Ir. Boni Hasudungan
NIP. 19660601 199303 1 012

Paraf Koordinasi :

01.	Sekretaris Bappelitbangda Kabupaten Manggarai Timur	
02.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Pembangunan Daerah	
03.	Kepala Bidang Pembangunan Manusia	
04.	Kepala Sub Bidang Pemerintahan & Pembangunan Manusia II	
05	Kepala Sub Bidang Data dan Informasi	

PERENCANAAN
BORONG, APRIL 2025

KEPALA BAPPERIDA
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

Drs. Remigius Gonsa Tombor
NIP. 19681001 199403 1 009

Paraf Koordinasi :

01.	Sekretaris Dinas Komunikasi & Informatika Kabupaten Manggarai Timur	
02.	Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi & Informatika Kabupaten Manggarai Timur	

WALIDATA
BORONG, APRIL 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

Bonefasius Sai.S,Sos
NIP. 19711219 199803 1 007

Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah

Berpedoman pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Timur dan menyesuaikan dengan aturan Permendagri No. 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Permendagri No.90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH											
- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan - Meningkatnya efektivitas Pemerintahan - Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang berkualitas		Nilai SAKIP Pemerintah Daerah (Nilai)	61,31	62,95	65,58	67,7	69,8	70	71	
			Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	60,27	67,84	74,36	79,83	84,25	87,62	89,94	
			Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	3,82	3,88	4,09	4,3	4,51	4,72	4,93	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah (Nilai)	61,31	62,95	65,58	67,7	69,8	70	71	
			Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	60,27	67,84	74,36	79,83	84,25	87,62	89,94	

Berdasarkan uraian Tabel kesesuaian Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah-Renstra-Renja : Pelayanan Sekertariat Daerah Kabupaten Manggarai Timur 2025-2030 tersebut diatas dapat menunjukan gambaran hasil yang ingin dicapai oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Timur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam rangka memenuhi kinerja sasaran setiap tahun tersebut diperlukan cara untuk mencapainya. Cara mencapai sasaran berbentuk strategi dan kebijakan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang mendukung dan menghambat pencapaiannya, untuk itu dilakukan analisis lingkungan internal dan eksternal sehingga diperoleh formulasi strategi dan kebijakan yang tepat dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Timur.

3.2 Rincian Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2025 (Form 2)

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari dokumen rencana strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Timur yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja (Renja) disusun untuk satu tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Timur yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Rumusan program dan kegiatan pembangunan daerah mengahsilkan renccana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Dalam Renja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025 terdapat 3 (tiga) program, 19 (sembilan belas) kegiatan dan 49 (empat puluh sembilan) sub kegiatan, baik program utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung visi dan misi daerah, maupun program dan kegiatan pendukung. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan. Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program.

Seluruh Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025 yang tertuang dalam Renja Perubahan bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-PP Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025.

Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan Rencana Perangkat Daerah terdiri dari 3 program dan 19 kegiatan untuk pelaksanaan pada Perubahan Renja TA. 2025 dan dapat dilihat pada Form. 2 Rincian Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2025 berikut :

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. MANGGARAI TIMUR
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		SEKRETARIAT DAERAH							**21.024.766.655,00**	**21.601.672.614,00**	**18.188.778.326,00**	**-2.835.988.329,00**							**17.843.231.090,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**21.024.766.655,00**	**21.601.672.614,00**	**18.188.778.326,00**	**-2.835.988.329,00**							**17.843.231.090,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**21.024.766.655,00**	**21.601.672.614,00**	**18.188.778.326,00**	**-2.835.988.329,00**							**17.843.231.090,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**17.981.652.255,00**	**17.156.094.414,00**	**14.217.163.626,00**	**-3.717.464.024,00**							**14.264.188.231,00**	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	6.765.226.237,00	6.908.845.098,00	6.900.664.586,00	135.438.349,00			-	P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik	-		6.991.326.485,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				39 Orang/bulan	39 Orang/bulan	5.778.438.565,00	5.948.919.258,00	5.957.769.746,00	179.331.181,00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik			5.953.303.984,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	969.756.672,00	942.894.840,00	942.894.840,00	-26.861.832,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Borong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik			1.028.005.010,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	17.031.000,00	17.031.000,00	0,00	-17.031.000,00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik			10.017.491,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	-4.000.000,00			-	P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik	-		4.016.250,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				6 Laporan	6 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik			4.016.250,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	71.000.000,00	77.000.000,00	77.000.000,00	6.000.000,00			-	P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik	-		6.825.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				12 Paket	12 Paket	71.000.000,00	77.000.000,00	77.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik			6.825.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	2.732.303.600,00	2.299.803.300,00	2.294.379.800,00	-437.923.800,00			-	P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik	-		965.426.282,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	65.679.500,00	31.335.500,00	30.588.000,00	-35.091.500,00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik			28.005.579,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	128.764.600,00	188.455.100,00	187.658.600,00	58.894.000,00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik			229.511.123,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	63.780.500,00	53.875.700,00	47.656.100,00	-16.124.400,00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik			58.975.686,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	427.148.000,00	166.344.000,00	132.314.000,00	-294.834.000,00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik			149.425.920,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	2.046.931.000,00	1.859.793.000,00	1.896.163.100,00	-150.767.900,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik			499.507.974,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	3.406.438.510,00	2.577.036.313,00	879.147.637,00	-2.527.290.873,00			-	P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik	-		2.459.734.846,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	1.677.280.000,00	1.677.280.000,00	0,00	-1.677.280.000,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik			1.761.144.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	517.000.000,00	0,00	0,00	-517.000.000,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik			542.850.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	1.212.158.510,00	899.756.313,00	879.147.637,00	-333.010.873,00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik			155.740.846,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	521.363.176,00	510.994.528,00	503.596.528,00	-17.766.648,00			-	P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik	-		528.090.934,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	27.302.700,00	17.500.000,00	17.500.000,00	-9.802.700,00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik			14.764.431,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	244.620.976,00	244.055.028,00	244.055.028,00	-565.948,00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik			259.213.033,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	9.480.000,00	9.480.000,00	9.480.000,00	0,00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik			8.568.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	239.959.500,00	239.959.500,00	232.561.500,00	-7.398.000,00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik			245.545.470,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.074.336.057,00	2.570.650.000,00	1.465.450.000,00	-608.886.057,00			-	P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik	-		1.211.957.523,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	120.440.000,00	91.340.000,00	91.340.000,00	-29.100.000,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik			117.895.680,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				37 Unit	37 Unit	1.003.568.250,00	816.710.000,00	806.910.000,00	-196.658.250,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik			902.274.660,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				80 Unit	80 Unit	51.800.000,00	33.600.000,00	33.600.000,00	-18.200.000,00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik			53.785.620,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	898.527.807,00	1.629.000.000,00	533.600.000,00	-364.927.807,00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik			138.001.563,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-				-	-	785.409.175,00	785.409.175,00	785.409.175,00	0,00			-	P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik	-		564.402.019,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	185.409.175,00	185.409.175,00	185.409.175,00	0,00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik			200.262.019,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				4 Orang	4 Orang	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik			107.100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik			257.040.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-				-	-	870.000.000,00	870.000.000,00	993.125.000,00	123.125.000,00			-	P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik	-		923.580.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	480.000.000,00	480.000.000,00	570.000.000,00	90.000.000,00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik			514.080.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	390.000.000,00	390.000.000,00	423.125.000,00	33.125.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik			409.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	-				-	-	519.219.500,00	320.000.000,00	199.620.900,00	-319.598.600,00			-	P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik	-		472.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				40 Dokumen	40 Dokumen	276.926.500,00	120.000.000,00	112.867.900,00	-164.058.600,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik			157.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				40 Laporan	40 Laporan	69.716.500,00	53.272.000,00	23.899.600,00	-45.816.900,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik			78.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				2 Dokumen	2 Dokumen	74.768.000,00	53.934.000,00	27.074.400,00	-47.693.600,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik			78.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				40 Dokumen	40 Dokumen	51.644.500,00	46.728.000,00	21.672.000,00	-29.972.500,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik			78.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				43 Dokumen	43 Dokumen	46.164.000,00	46.066.000,00	14.107.000,00	-32.057.000,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik			78.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-				-	-	232.356.000,00	232.356.000,00	118.770.000,00	-113.586.000,00			-	P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik	-		136.328.892,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				12 Laporan	12 Laporan	75.694.000,00	75.694.000,00	75.694.000,00	0,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik			14.565.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				12 Laporan	12 Laporan	88.208.000,00	88.208.000,00	23.752.000,00	-64.456.000,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik			105.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				12 Laporan	12 Laporan	68.454.000,00	68.454.000,00	19.324.000,00	-49.130.000,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik			16.763.292,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**-**				**-**	**-**	**2.394.211.500,00**	**3.742.378.300,00**	**3.426.568.800,00**	**521.831.359,00**							**2.916.042.859,00**	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	-				-	-	974.497.000,00	989.509.000,00	922.394.500,00	-52.102.500,00			-	P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik	-		199.920.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				4 Dokumen	4 Dokumen	24.400.000,00	27.240.000,00	21.200.000,00	-3.200.000,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik			52.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				2 Dokumen	2 Dokumen	43.476.000,00	41.436.000,00	23.027.500,00	-20.448.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik			36.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	906.621.000,00	920.833.000,00	878.167.000,00	-28.454.000,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik			110.670.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-				-	-	546.581.500,00	1.675.727.500,00	1.517.853.500,00	971.272.000,00			-	P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik	-		1.585.080.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	1 Dokumen	20.181.500,00	67.156.000,00	37.272.000,00	17.090.500,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik			52.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				1 Dokumen	1 Dokumen	519.400.000,00	1.601.571.500,00	1.476.581.500,00	957.181.500,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik			1.522.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				12 Dokumen	12 Dokumen	7.000.000,00	7.000.000,00	4.000.000,00	-3.000.000,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik			10.080.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-				-	-	272.111.000,00	480.819.800,00	401.684.800,00	129.573.800,00			-	P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik	-		559.842.859,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah																		
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				119 Dokumen	119 Dokumen	184.550.500,00	379.614.300,00	371.109.300,00	186.558.800,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik			389.445.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				2 Kasus	2 Kasus	73.513.500,00	62.279.500,00	5.659.500,00	-67.854.000,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik			153.300.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum																		
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				210 Dokumen	210 Dokumen	14.047.000,00	38.926.000,00	24.916.000,00	10.869.000,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik			17.097.859,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	-				-	-	601.022.000,00	596.322.000,00	584.636.000,00	-16.386.000,00			-	P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik	-		571.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				10 Dokumen	10 Dokumen	601.022.000,00	596.322.000,00	584.636.000,00	-16.386.000,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik			571.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
3.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**-**				**-**	**-**	**648.902.900,00**	**703.199.900,00**	**545.045.900,00**	**14.097.100,00**							**663.000.000,00**	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-				-	-	96.469.000,00	112.822.000,00	88.210.000,00	-8.259.000,00			-	P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik	-		55.125.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				16 Laporan	16 Laporan	96.469.000,00	112.822.000,00	88.210.000,00	-8.259.000,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik			55.125.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-				-	-	13.316.500,00	40.841.500,00	13.257.500,00	-59.000,00			-	P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik	-		13.969.226,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				16 Laporan	16 Laporan	13.316.500,00	40.841.500,00	13.257.500,00	-59.000,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik			13.969.226,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-				-	-	477.572.400,00	447.572.400,00	402.781.400,00	-74.791.000,00			-	P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik	-		523.852.373,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				100 Dokumen	100 Dokumen	353.018.300,00	323.018.300,00	314.267.800,00	-38.750.500,00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik			366.696.661,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				50 Dokumen	50 Dokumen	72.806.300,00	72.806.300,00	45.185.800,00	-27.620.500,00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik			104.770.475,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				50 Orang	50 Orang	51.747.800,00	51.747.800,00	43.327.800,00	-8.420.000,00	Kab. Manggarai Timur, Borong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik			52.385.237,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-				-	-	61.545.000,00	101.964.000,00	40.797.000,00	-20.748.000,00			-	P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik	-		70.053.401,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				11 Dokumen	11 Dokumen	61.545.000,00	101.964.000,00	40.797.000,00	-20.748.000,00	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik P4. Refermoamsi Birokrasi Melalui Peningkaatan Pelayanan Publik, Keamanan Dan Ketertiban Serta Stabilitas Politik			70.053.401,00	SEKRETARIAT DAERAH
	J U M L A H								**21.024.766.655,00**	**21.601.672.614,00**	**18.188.778.326,00**	**-80.402.118.111,00**							**17.843.231.090,00**	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 dilakukan utnuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi. Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Perubahan RKPD) Tahun 2025 dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025.

Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 terdiri dari 3 program dan 19 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 20.185.118.277 mengalami pengurangan sebesar Rp. 1.416.554.337 dari anggaran sebelumnya yang sebesar Rp. 21.601.672.614.

Pengurangan anggaran tersebut dilakukan karena adanya efisiensi anggran pada setiap SKPD yang ada Di Kabupaten Manggarai Timur.

Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 selanjutnya menjadi pedoman bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Timur dalam menyusun Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKPA) Tahun Anggaran 2025.

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atas proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya mental, semangat, kejujuran dan disiplin pada pelaku pembangunan yang tetap harus dikedepankan.

Untuk mencapai target sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Timur yang telah ditetapkan pada tahun 2025 maka perlu didukung dengan program dan kegiatan.

Agar program dan kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka perlu dilakukan koordinasi lintas Unit Kerja/Perangkat Daerah dalam rangka sinergritas.

Borong, September 2025

Sekretaris Daerah
Kabupaten Manggarai Tmur,

Ir. Boni Hasudungan
Pembina Utama Madya
19660601 199303 1 012